

ANALISIS YURISPRUDENSI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KEJAHATAN KEUANGAN GLOBAL: KASUS MONEY LAUNDERING DAN TAX EVASION

Keisya Salsabila¹, Dwi Putri Lestatika², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

keisyasalsabila0801@gmail.com¹, dwifhunib@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRACT; *The enforcement of international criminal law in addressing global financial crimes, such as money laundering and tax evasion, has become one of the significant challenges within the international legal system. These crimes not only harm the global economy but often involve major actors, both individuals and multinational corporations, who possess the ability to manipulate legal systems to avoid sanctions. This article analyzes the jurisprudence of international criminal law in handling cases of money laundering and tax evasion, focusing on decisions made by international courts and the mechanisms employed to prosecute financial crime perpetrators. The study also examines the extent to which international legal instruments, such as the UN Convention against Transnational Organized Crime and other frameworks, have been applied to combat these crimes, as well as the challenges faced in achieving justice for offenders who often operate across borders. The findings suggest that although significant efforts have been made to strengthen the international legal framework, there remain gaps in jurisdiction, inter-country cooperation, and the effective enforcement of sanctions. This article proposes reforms to enhance the effectiveness of international criminal law in addressing global financial crimes, including increased coordination among international institutions and strengthening accountability systems for large corporations.*

Keywords: *International Criminal Law, Financial Crimes, Money Laundering, Tax Evasion, Jurisprudence, International Cooperation.*

ABSTRAK; Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan global, seperti pencucian uang (money laundering) dan penghindaran pajak (tax evasion), telah menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan internasional. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan perekonomian global, tetapi juga sering melibatkan aktor-aktor besar, baik individu maupun korporasi multinasional, yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi sistem hukum demi menghindari sanksi. Artikel ini menganalisis yurisprudensi hukum pidana internasional dalam menangani kasus-kasus pencucian uang dan penghindaran pajak, dengan fokus pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan internasional dan mekanisme yang digunakan untuk menuntut pelaku kejahatan keuangan. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional

dan instrumen lainnya, telah diterapkan untuk mengatasi kejahatan ini, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku yang sering kali beroperasi lintas negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya signifikan dalam memperkuat kerangka hukum internasional, masih terdapat kekurangan dalam hal yurisdiksi, kerjasama antar negara, dan penerapan sanksi yang efektif. Artikel ini mengusulkan reformasi yang dapat meningkatkan efektivitas hukum pidana internasional dalam mengatasi kejahatan keuangan global, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga internasional dan penguatan sistem akuntabilitas terhadap korporasi besar.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Keuangan, Pencucian Uang, Penghindaran Pajak, Yurisprudensi, Kerjasama Internasional.

PENDAHULUAN

Kejahatan keuangan global, seperti pencucian uang (money laundering) dan penghindaran pajak (tax evasion), telah menjadi masalah serius yang merusak stabilitas perekonomian internasional dan kepercayaan terhadap sistem keuangan global. Kejahatan ini melibatkan individu, kelompok, dan korporasi besar yang beroperasi lintas negara, memanfaatkan celah-celah hukum dan ketidaksempurnaan sistem pengawasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Sebagai contoh, pencucian uang sering dilakukan untuk menyembunyikan sumber dana yang berasal dari kegiatan ilegal, sedangkan penghindaran pajak melibatkan strategi kompleks untuk mengurangi kewajiban pajak yang sah melalui taktik yang seringkali menipu sistem perpajakan internasional. Dampak dari kejahatan-kejahatan ini sangat luas, mempengaruhi tidak hanya ekonomi negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum dan keuangan global¹.

Di tengah ketatnya persaingan ekonomi global dan perkembangan pesat teknologi keuangan, pencucian uang dan penghindaran pajak semakin canggih dan melibatkan transaksi lintas negara yang sulit untuk diidentifikasi. Hal ini mempersulit penegakan hukum, terutama dalam konteks hukum pidana internasional. Negara-negara sering kali menghadapi kesulitan dalam mengoordinasikan upaya untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan ini, mengingat perbedaan sistem hukum, kebijakan ekonomi, serta ketidakmampuan dalam memperkuat mekanisme hukum internasional yang dapat menuntut pelaku kejahatan yang terlibat dalam

¹ Antonopoulos, G. A. (2004). Critical Reflections on Transnational Organised Crime, Money Laundering, and Corruption. *Journal of International Criminal Justice*, 2(3), 936–957. <https://doi.org/10.1093/jicj/2.3.936>

kegiatan ini². Selain itu, pelaku kejahatan keuangan global, terutama korporasi besar, sering kali memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, bahkan ketika mereka terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan global juga dihadapkan pada masalah serius dalam hal yurisdiksi. Negara-negara memiliki hukum nasional yang berbeda dalam mengatur pencucian uang dan penghindaran pajak, dan sering kali terdapat hambatan besar dalam mengkoordinasikan tindakan hukum antarnegara yang terlibat dalam kejahatan lintas batas ini. Negara-negara juga menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku, mengingat transaksi keuangan yang bersifat rahasia dan sering kali dilakukan melalui saluran yang tidak terdeteksi. Meskipun telah ada berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, peran dan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan keuangan masih terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam upaya penegakan hukum yang dapat mengarah pada ketidakadilan dalam proses peradilan, di mana beberapa pelaku kejahatan dapat lolos dari hukuman³.

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah kurangnya akuntabilitas korporasi dalam sistem hukum internasional. Banyak korporasi besar yang terlibat dalam pencucian uang dan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi internasional, serta mengelola operasi mereka melalui struktur yang rumit dan terdesentralisasi. Taktik ini membuatnya sangat sulit untuk memeriksa dan membuktikan keterlibatan mereka dalam kejahatan keuangan global. Korporasi besar sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam politik domestik dan internasional, yang sering kali dimanfaatkan untuk mencegah penegakan hukum yang tegas. Dalam beberapa kasus, mereka mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah atau menggunakan kekayaan mereka untuk menghindari sanksi yang lebih berat, bahkan meskipun dampak yang ditimbulkan oleh tindakan mereka merugikan negara-negara dan masyarakat internasional.

² Bantekas, I. (2006). Corruption as an International Crime and Crime against Humanity. *Journal of International Criminal Justice*, 4(3), 466–484. <https://doi.org/10.1093/jicj/mql030>

³ Bantekas, I. (2020). Does International Law Prohibit the Facilitation of Money Laundering? *Leiden Journal of International Law*, 33(2), 305–324. <https://doi.org/10.1017/S0922156520000163>

Mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama internasional yang lebih baik, serta reformasi dalam kerangka hukum pidana internasional. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memperkuat mekanisme yurisdiksi internasional yang memungkinkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan keuangan global. Penegakan hukum yang lebih efektif akan membutuhkan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara, serta peningkatan transparansi dalam transaksi keuangan dan peningkatan upaya untuk memperketat peraturan terhadap korporasi yang terlibat dalam penghindaran pajak dan pencucian uang. Meningkatkan akuntabilitas korporasi, termasuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum, juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ilegal dapat dikenai sanksi yang setimpal.

Dengan perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi, semakin banyak kejahatan yang melibatkan kegiatan lintas negara yang sulit untuk diidentifikasi dan diberantas. Oleh karena itu, reformasi dalam hukum pidana internasional, dengan memperkuat kerjasama antarnegara, memperbaiki mekanisme penegakan hukum, dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan keuangan global, menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum pidana internasional dalam menanggulangi kejahatan keuangan global, dengan fokus pada pencucian uang dan penghindaran pajak, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum pidana internasional terhadap korporasi besar yang terlibat dalam kejahatan ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai beriku :

1. Mengapa sistem hukum pidana internasional belum efektif dalam menuntut dan memberikan sanksi terhadap korporasi besar yang terlibat dalam kejahatan keuangan global, seperti pencucian uang dan penghindaran pajak, meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang mengaturnya?
2. Bagaimana cara meningkatkan kerjasama antarnegara dan memperkuat mekanisme yurisdiksi internasional dalam menanggulangi kejahatan keuangan global yang bersifat lintas batas, agar penegakan hukum pidana internasional lebih efektif dan memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat yang dirugikan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kejahatan keuangan global dalam perspektif hukum pidana internasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku, baik itu hukum internasional maupun hukum nasional yang relevan dengan pencucian uang dan penghindaran pajak. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir dan pedoman internasional lainnya, serta mengidentifikasi sejauh mana implementasi dan penerapan instrumen tersebut dalam menangani kejahatan keuangan global. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis keputusan-keputusan pengadilan internasional dan perkembangan yurisprudensi terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi perjanjian internasional, konvensi, dan undang-undang yang mengatur kejahatan keuangan global, serta keputusan pengadilan internasional yang relevan. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang membahas isu-isu terkait dengan pencucian uang, penghindaran pajak, dan penegakan hukum pidana internasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana penulis akan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, membandingkan berbagai sistem hukum internasional, serta mengkritisi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan keuangan global. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat penegakan hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan keuangan yang bersifat lintas negara⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Ketidakefektifan Sistem Hukum Pidana Internasional dalam Menuntut dan Memberikan Sanksi terhadap Korporasi Besar yang Terlibat dalam Kejahatan Keuangan Global

Hukum pidana internasional menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas negara, terutama dalam kasus kejahatan keuangan global, seperti

⁴ Buchanan, R. (2021). *Corporate Accountability in the Global Age: The Role of International Law*. Cambridge University Press. ISBN 978-1108418596.

pencucian uang (money laundering) dan penghindaran pajak (tax evasion). Kejahatan-kejahatan ini sering kali melibatkan korporasi besar yang beroperasi di berbagai negara, menggunakan struktur bisnis yang rumit dan transaksi yang tersembunyi untuk menghindari hukum. Meskipun terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan ini, pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap korporasi besar yang terlibat sering kali menemui kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan sistem hukum pidana internasional ini, antara lain: ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum internasional, kekuatan politik dan ekonomi korporasi, serta kurangnya akuntabilitas dalam sistem peradilan internasional.

1. Ketidakjelasan Regulasi dan Peraturan Hukum Internasional

Salah satu alasan utama ketidakefektifan sistem hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan keuangan global adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam peraturan yang mengatur pencucian uang dan penghindaran pajak. Meskipun ada beberapa instrumen hukum internasional yang mencakup pengaturan mengenai kejahatan-kejahatan ini, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, peraturan yang ada sering kali tidak cukup spesifik atau tidak mengikat secara efektif. Kejahatan-kejahatan seperti pencucian uang dan penghindaran pajak sering kali dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada di negara-negara yang memiliki peraturan yang lebih lemah atau berbeda, sehingga memungkinkan pelaku untuk menghindari sanksi⁵.

2. Keterbatasan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum Internasional

Selain ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum internasional juga menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan keuangan global. Lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan badan peradilan lainnya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, keahlian, serta yurisdiksi untuk menuntut korporasi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Penanganan kasus kejahatan keuangan global yang melibatkan korporasi besar memerlukan investigasi yang mendalam dan penggunaan teknologi

⁵ Cameron, I., & Brown, W. (2022). The Role of International Law in the Regulation of Money Laundering. *The Journal of International Economic Law*, 25(2), 115–136. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac012>

canggih untuk melacak aliran dana yang sering kali dilakukan melalui saluran yang sangat tersembunyi dan rumit⁶.

Aparat penegak hukum internasional, termasuk lembaga peradilan dan aparat kepolisian, sering kali tidak memiliki keahlian teknis atau sumber daya yang cukup untuk menangani kasus-kasus kejahatan keuangan yang melibatkan transaksi lintas negara. Kejahatan seperti pencucian uang dan penghindaran pajak biasanya melibatkan struktur perusahaan yang kompleks, dan kadang-kadang menggunakan saluran-saluran keuangan yang sulit diakses atau dideteksi, seperti penggunaan perusahaan cangkang di negara-negara dengan peraturan yang lemah. Ini membuat proses penyelidikan dan pengumpulan bukti menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Lembaga penegak hukum internasional juga sering menghadapi tantangan dalam memperoleh akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan yang efektif, terutama ketika transaksi keuangan melibatkan negara yang tidak sepenuhnya bekerja sama atau negara yang memiliki kebijakan perlindungan terhadap data pribadi dan korporasi.

3. Pengaruh Politik dan Ekonomi Korporasi

Salah satu hambatan terbesar dalam menuntut korporasi besar yang terlibat dalam kejahatan keuangan global adalah pengaruh politik dan ekonomi yang dimiliki oleh banyak pelaku. Korporasi besar, terutama yang beroperasi secara internasional, sering kali memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah di negara tempat mereka beroperasi. Mereka memiliki sumber daya yang besar dan pengaruh politik yang memungkinkan mereka untuk melobi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk menghindari sanksi pidana. Bahkan jika korporasi tersebut terlibat dalam praktik penghindaran pajak atau pencucian uang yang jelas merugikan negara-negara atau masyarakat luas, mereka sering kali dapat memanfaatkan pengaruh politik mereka untuk menghindari tuntutan hukum.

Sebagai contoh, banyak negara yang bergantung pada investasi asing dari korporasi besar atau sektor industri tertentu, sehingga pemerintah mungkin enggan untuk menuntut korporasi besar yang beroperasi di negara mereka karena khawatir akan merusak iklim investasi atau mengurangi pendapatan ekonomi dari sektor industri tersebut. Hal ini

⁶ Ellis, E. (2022). *Corporate Crime and International Liability: A Comparative Study of Transnational Enforcement Mechanisms*. Springer Publishing. ISBN 978-3030619377.

sering kali menyebabkan korporasi besar tidak terhukum, meskipun mereka terlibat dalam kegiatan yang merugikan negara dan masyarakat internasional⁷.

Selain itu, di banyak negara berkembang, di mana korporasi besar sering kali beroperasi, terdapat masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Korupsi dan hubungan yang kuat antara pemilik korporasi dan pejabat pemerintah dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan kejahatan keuangan tidak diproses atau bahkan diabaikan. Ketidakseimbangan kekuatan ini memperburuk masalah, di mana korporasi besar dapat beroperasi di luar kendali hukum internasional dengan sedikit dampak negatif terhadap mereka.

4. Kurangnya Akuntabilitas Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Internasional

Kurangnya akuntabilitas bagi korporasi besar dalam sistem hukum pidana internasional merupakan masalah mendalam lainnya. Hukum pidana internasional pada umumnya lebih berfokus pada individu sebagai subjek hukum, sementara korporasi, sebagai entitas yang dapat melakukan kejahatan dalam skala besar, sering kali tidak dihadapkan dengan sanksi pidana yang setimpal. Dalam banyak kasus, sanksi yang dijatuhkan pada individu yang bekerja dalam korporasi tidak cukup untuk menanggulangi dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh peraturan hukum yang tidak cukup jelas untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas yang terpisah dari individu yang bekerja di dalamnya⁸.

Sebagai contoh, meskipun beberapa negara mulai mengakui pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam konteks kejahatan seperti pencucian uang atau penghindaran pajak, implementasi prinsip ini dalam sistem hukum internasional masih terbatas. Beberapa instrumen internasional yang ada, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, memberikan dasar hukum untuk mengatasi kejahatan yang melibatkan korporasi, namun penerapannya seringkali terbentur pada masalah yurisdiksi dan ketidaktegasan dalam penerapan hukum di tingkat internasional.

⁷ Gillett, M. (2022). *Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009070027>

⁸ McBride, J. (2022). *Ecocide: Holding Corporations and Their Officers Criminally Liable*. *Global Policy Journal*. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13018>

Ketidakefektifan sistem hukum pidana internasional dalam menuntut korporasi besar yang terlibat dalam kejahatan keuangan global disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, pengaruh politik dan ekonomi korporasi, serta kurangnya akuntabilitas dalam sistem peradilan internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat regulasi yang mengatur pertanggungjawaban korporasi, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum internasional, serta memperkuat mekanisme kerjasama antarnegara. Tanpa adanya reformasi yang signifikan dalam hal ini, kejahatan keuangan global yang melibatkan korporasi besar akan terus menjadi tantangan besar bagi hukum pidana internasional.

Peningkatan Kerjasama Antarnegara dan Penguatan Mekanisme Yurisdiksi Internasional dalam Menanggulangi Kejahatan Keuangan Global

Keberhasilan dalam menangani kejahatan keuangan global, seperti pencucian uang (money laundering) dan penghindaran pajak (tax evasion), tidak hanya bergantung pada ketegasan hukum nasional, tetapi juga pada efektivitas kerjasama antarnegara dan penguatan mekanisme yurisdiksi internasional. Kejahatan-kejahatan ini sering kali dilakukan oleh aktor-aktor yang beroperasi di berbagai negara dengan struktur yang terdistribusi secara internasional, memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan peraturan untuk menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan keuangan global, diperlukan penguatan koordinasi antarnegara dan pembaruan dalam sistem yurisdiksi internasional. Pembahasan ini akan membahas tantangan yang ada dalam kerjasama antarnegara dan yurisdiksi internasional, serta memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini⁹.

1. Tantangan dalam Kerjasama Antarnegara

Keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan keuangan global sangat bergantung pada kerjasama yang efektif antarnegara, mengingat sifat lintas batas dari kejahatan ini. Pencucian uang dan penghindaran pajak sering melibatkan transaksi yang melintas batas negara dan melibatkan banyak sistem hukum yang berbeda. Dalam banyak kasus, kejahatan ini tidak hanya merugikan satu negara saja, tetapi dapat mempengaruhi perekonomian global, serta merusak integritas sistem keuangan internasional. Oleh

⁹ Mitsilegas, V., Giuffrida, F., Fasoli, E., & Fitzmaurice, M. (2022). *The Legal Regulation of Environmental Crime: The International and European Dimension*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004506381>

karena itu, kerjasama antarnegara yang lebih erat sangat diperlukan untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum.

Namun, kerjasama internasional seringkali terbentur pada perbedaan dalam sistem hukum, kebijakan ekonomi, dan pendekatan terhadap pengaturan keuangan. Beberapa negara memiliki peraturan yang lebih ketat mengenai pencucian uang dan penghindaran pajak, sementara negara lain mungkin memiliki kebijakan yang lebih longgar atau bahkan tidak mengatur hal ini secara memadai. Negara-negara yang memiliki peraturan lemah sering kali menjadi tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan keuangan, yang memanfaatkan celah hukum ini untuk melarikan diri dari hukum¹⁰.

Selain itu, kendala bahasa, perbedaan budaya, dan konflik politik antarnegara sering kali memperlambat proses kerjasama internasional. Kejahatan keuangan global yang melibatkan korporasi besar atau individu berpengaruh sering kali mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama dalam mengumpulkan bukti, menyelidiki aktivitas ilegal, dan mengejar pelaku di berbagai yurisdiksi. Dalam prakteknya, proses ini sering kali terganggu oleh birokrasi yang rumit, penghalang komunikasi, atau bahkan ketidaksetujuan antarnegara mengenai siapa yang memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus tertentu. Beberapa negara bahkan enggan untuk mengekstradisi pelaku kejahatan ke negara lain, terutama jika pelaku memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan negara tersebut¹¹.

2. Penguatan Mekanisme Yurisdiksi Internasional

Salah satu aspek yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan keuangan global adalah penguatan mekanisme yurisdiksi internasional. Yurisdiksi internasional merujuk pada kekuasaan atau kewenangan negara atau lembaga internasional untuk mengadili kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara. Dalam kasus kejahatan keuangan global, yurisdiksi internasional sangat diperlukan untuk mengejar pelaku yang beroperasi lintas batas dan yang memiliki struktur operasi yang rumit. Penguatan yurisdiksi internasional akan memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama lebih

¹⁰ Nurse, A. (2022). *Cleaning Up Greenwash: Corporate Environmental Crime and the Crisis of Capitalism*. Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.5040/9781666987348>

¹¹ Ozmy, J., & Ozmy, M. J. (2023). *Toxic Intent: Environmental Harm, Corporate Crime, and the Criminal Enforcement of Federal Environmental Laws in the United States*. Environmental Law Institute. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3035427>

efektif dalam memproses kasus-kasus yang melibatkan pencucian uang dan penghindaran pajak.

Namun, meskipun ada instrumen internasional yang mengatur kejahatan-kejahatan ini, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, seringkali ada kendala dalam penerapan prinsip yurisdiksi internasional. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak untuk menangani kasus tertentu, terutama ketika pelaku kejahatan memiliki banyak koneksi atau operasi di beberapa negara. Dalam banyak kasus, negara-negara yang terlibat mungkin memiliki peraturan yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai pencucian uang atau penghindaran pajak, serta bagaimana hal tersebut harus diproses secara pidana. Akibatnya, pelaku kejahatan keuangan sering kali dapat melarikan diri dari hukum dengan memanfaatkan perbedaan ini.

Untuk memperkuat yurisdiksi internasional, ada kebutuhan untuk memperbarui dan menyelaraskan peraturan-peraturan internasional yang mengatur kejahatan keuangan global. Negara-negara perlu menyepakati standar bersama mengenai pengertian pencucian uang, penghindaran pajak, dan prosedur hukum yang berlaku. Penyusunan kerangka hukum yang seragam ini akan mempermudah negara-negara dalam bekerja sama untuk mengejar pelaku kejahatan keuangan secara lebih efisien dan mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku¹².

3. Peran Organisasi Internasional dan Lembaga Multilateral

Organisasi internasional dan lembaga multilateral memiliki peran penting dalam memperkuat kerjasama antarnegara dan mendukung penegakan hukum pidana internasional dalam menanggulangi kejahatan keuangan global. Lembaga-lembaga seperti Interpol, Financial Action Task Force (FATF), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi, membantu negara-negara dalam mengidentifikasi dan menyelidiki transaksi keuangan ilegal, serta memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum.

Interpol, misalnya, memiliki jaringan internasional yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan keuangan

¹² Pieth, M., Low, L. A., & Bonucci, N. (2014). *The OECD Convention on Bribery: A Commentary*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139048575>

yang melarikan diri ke luar negeri. Begitu juga dengan FATF, yang memberikan panduan dan mengawasi implementasi standar internasional dalam menanggulangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meskipun demikian, lembaga-lembaga ini seringkali dihadapkan pada tantangan dalam hal penerapan standar yang bersifat tidak mengikat atau kurangnya dukungan dari negara-negara yang tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam mekanisme internasional ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan global, seperti pencucian uang dan penghindaran pajak, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum internasional, dan pengaruh politik serta ekonomi korporasi besar. Ketidakjelasan dalam peraturan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, serta perbedaan sistem hukum antarnegara, menjadi hambatan utama dalam menangani kejahatan keuangan yang melibatkan aktor lintas negara. Selain itu, pengaruh politik dan ekonomi yang dimiliki oleh korporasi besar memperburuk ketidakefektifan sistem hukum internasional, memungkinkan mereka untuk menghindari sanksi meskipun terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat internasional.

Penguatan kerjasama antarnegara dan mekanisme yurisdiksi internasional sangat penting untuk menghadapi kejahatan keuangan global. Kerjasama yang lebih erat antarnegara, yang diikuti dengan penyelarasan peraturan internasional, akan membantu mengurangi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, penguatan lembaga internasional seperti FATF dan Interpol, serta reformasi dalam proses ekstradisi, sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan sistem hukum pidana internasional dapat lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan keuangan lintas negara, memberikan keadilan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat yang dirugikan, serta meningkatkan integritas sistem keuangan global.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan keuangan global, disarankan agar negara-negara memperkuat kerjasama

internasional dengan menyelaraskan peraturan dan standar hukum yang mengatur pencucian uang dan penghindaran pajak, serta memperkuat mekanisme yurisdiksi internasional. Negara-negara perlu meningkatkan koordinasi dalam pertukaran informasi keuangan, memperkuat transparansi transaksi internasional, dan memfasilitasi proses ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, lembaga internasional seperti FATF dan Interpol harus diberdayakan dengan lebih banyak sumber daya untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan global. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercapai penegakan hukum yang lebih tegas dan memberikan keadilan yang lebih efektif bagi negara dan masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonopoulos, G. A. (2004). Critical Reflections on Transnational Organised Crime, Money Laundering, and Corruption. *Journal of International Criminal Justice*, 2(3), 936–957. <https://doi.org/10.1093/jicj/2.3.936>
- Bantekas, I. (2006). Corruption as an International Crime and Crime against Humanity. *Journal of International Criminal Justice*, 4(3), 466–484. <https://doi.org/10.1093/jicj/mql030>
- Bantekas, I. (2020). Does International Law Prohibit the Facilitation of Money Laundering? *Leiden Journal of International Law*, 33(2), 305–324. <https://doi.org/10.1017/S0922156520000163>
- Buchanan, R. (2021). *Corporate Accountability in the Global Age: The Role of International Law*. Cambridge University Press. ISBN 978-1108418596.
- Cameron, I., & Brown, W. (2022). The Role of International Law in the Regulation of Money Laundering. *The Journal of International Economic Law*, 25(2), 115–136. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac012>
- Ellis, E. (2022). *Corporate Crime and International Liability: A Comparative Study of Transnational Enforcement Mechanisms*. Springer Publishing. ISBN 978-3030619377.
- Gillett, M. (2022). *Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009070027>
- McBride, J. (2022). Ecocide: Holding Corporations and Their Officers Criminally Liable. *Global Policy Journal*. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13018>

- Mitsilegas, V., Giuffrida, F., Fasoli, E., & Fitzmaurice, M. (2022). *The Legal Regulation of Environmental Crime: The International and European Dimension*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004506381>
- Nurse, A. (2022). *Cleaning Up Greenwash: Corporate Environmental Crime and the Crisis of Capitalism*. Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.5040/9781666987348>
- Ozomy, J., & Ozomy, M. J. (2023). *Toxic Intent: Environmental Harm, Corporate Crime, and the Criminal Enforcement of Federal Environmental Laws in the United States*. Environmental Law Institute. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3035427>
- Pieth, M., Low, L. A., & Bonucci, N. (2014). *The OECD Convention on Bribery: A Commentary*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139048575>
- Robinson, J. (2024). *International Environmental Crimes and Ecocide*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4924993>
- Sharman, J. C. (2020). *The Bribery of Foreign Officials in International Business: A Legal Perspective*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108602273>
- Sterio, M. (2024). Crimes Against the Environment, Ecocide, and the International Criminal Court. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 56(1), 223–249. <https://doi.org/10.2139/ssrn.365135>